

BAB IV

TEKANAN *GREENPEACE* DALAM MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN AUSTRALIA

Perkembangan politik tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya kesadaran civil society untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih berkualitas. Mereka akan berupaya untuk mempengaruhi sistem politik agar rumusan kebijakan menjadi berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pada sisi lain, ada pula pers yang menjadi alat kontrol bagi penyelenggara kekuasaan melalui publikasi dan pembentukan opini publik.

A. Tekanan *Greenpeace* Melalui saluran Langsung

Berdasarkan Kyoto Protocol, Australia mendapat kewajiban untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai dengan Annex I Kyoto Protocol. Yang berkewajiban mengurangi emisi GRK adalah negara-negara maju. Sedangkan kewajiban negara berkembang adalah menghapuskan kemiskinan, yang merupakan sumber utama kerusakan lingkungan dan perambahan hutan.

Pengalaman negara-negara lain seperti Brazil yang telah berhasil menurunkan emisi GRK, ternyata mendapat kesulitan dalam mencairkan dana bantuan yang dijanjikan. Brazil telah melakukan program-program penurunan emisi GRK yang telah disepakati, namun dana bantuan yang dijanjikan sulit turun, karena persyaratan-persyaratannya ditentukan oleh negara penyandang dana.

Keterlibatan *Greenpeace* dalam upaya penyelamatan lingkungan di pasifik telah berlangsung sejak tahun 1980-an dan mulai memberikan tekanan pada

National Marine Fisheries Servis (NMFS) untuk memasukkan SSL (*Steller Sea Lion*) sebagai salah satu daftar mamalia yang terancam punah pada akhir tahun 1980-an. Pada tahun 1998, *Greenpeace* dalam *American ocean campaign* dan *Sierra club* menuduh NMFS telah gagal mencegah bahaya yang muncul terhadap populasi SSL dan gagal melindungi habitat kritisnya. Kelompok aktivis lingkungan tersebut melakukan tuntutan dengan mengerahkan masyarakat sipil melawan NMFS dalam Pengadilan Negara Bagian Amerika Serikat untuk *Western District of Washington*. *Greenpeace* menantang pengadilan dengan opini biologis dalam mengevaluasi hubungan antara industrialisasi perikanan laut dan penurunan populasi SSL. Tantangan ini secara efektif mampu membuat pengadilan federal dan hakim Thomas S. Zilly untuk menyelesaikan suatu kebijakan perikanan.⁵⁸

Greenpeace menemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh NMFS dalam mengatur pengelolaan usaha penangkapan ikan di perairan laut Australia. Selain melakukan kampanye *Greenpeace* mengajukan tuntutan pada pengadilan federal. Dalam tuntutan tersebut *Greenpeace* menentang NMFS dengan tuduhan sebagai berikut⁵⁹ :

- a. NMFS tidak melengkapi suatu EIS (*Executive Information System*) yang komprehensif sebagaimana yang disyaratkan oleh NEPA (*National Environmental Policy Act*)

⁵⁸ Budi Kurniawan, Membedah Ekosistem Australia dalam <http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8878943131924590189> - fn9, diakses 12 Agustus 2010

⁵⁹ Budi Kurniawan, Membedah Ekosistem Australia dalam <http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8878943131924590189> - fn10, diakses 12 Agustus 2010

- b. NMFS tidak menentukan dampak kumulatif dari perubahan industri penangkapan ikan selama beberapa waktu dan dampaknya terhadap SSL
- c. NMFS telah gagal untuk menyediakan perlindungan bagi SSL dalam area pertumbuhan (perkembangbiakan) mereka
- d. NMFS telah mengizinkan peningkatan penangkapan ikan dalam area habitat kritis SSL
- e. NMFS tidak mengambil tindakan yang signifikan terhadap para penangkap ikan dalam lokasi dimana terjadi penurunan SSL
- f. NMFS tidak menetapkan waktu yang cukup dan pembatasan area
- g. Seluruh praktek NMFS secara rasional tidak mengikuti fakta-fakta lingkungan yang telah dibuktikan secara scientific padahal NMFS terdiri dari ilmuwan lingkungan yang terbaik
- b. Bentuk Kebijakan Pemerintah

1) *Disseminating an Ecological Sensibility*

Greenpeace Australia telah resmi, menjadi organisasi lingkungan transnasional telah berhasil menyebarluaskan kampanye mereka, pada waktu itu adalah tentang upaya penghentian perburuan hewan laut yang terancam punah, kampanye *Greenpeace* berhasil tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka menggunakan strategi yang jauh efektif yaitu tekanan publik. Aksi-aksi kampanye yang dilakukan oleh aktivis *Greenpeace* seperti memanjati kapal-kapal penangkap ikan paus, terjun payung dari puncak cerobong asap,

menutup pipa-pipa pembuangan limbah industri, mengapungkan balon udara ke daerah percobaan nuklir. Kampanye *Greenpeace* mengenai SSL ini mendapat dukungan dari 8719 partisipan masyarakat Amerika Serikat.⁶⁰

2) Tekanan pada Pemerintah terhadap Deklarasi Cartagena

Greenpeace telah menyerahkan kepada pertemuan sebelumnya tentang analisis rinci dan menyarankan teks yang menunjukkan bahwa dana yang mengikat secara hukum internasional adalah mungkin. Sebuah mekanisme untuk memastikan tambahan kompensasi dan ganti rugi adalah persyaratan bagi eksportir untuk membangun dan menjaga keamanan keuangan untuk menutupi kerusakan dari organism rekayasa genetik.

Industri rekayasa genetik telah mengusulkan dana sukarela dimana perusahaan yang memproduksi enam rekayasa genetik akan memberikan kompensasi untuk kasus-kasus kerusakan signifikan keanekaragaman hayati, pada ketentuan yang tercantum dalam Cartagena Compact.

Hal ini tidak dapat diterima untuk sebuah instrumen yang mengikat secara hukum internasional untuk tergantung pada skema swasta sukarela. Ini akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik dan transparan. Seperti privatisasi

⁶⁰ Budi Kurniawan, Membedah Ekosistem Australia dalam <http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8878943131924590189> - fn11. diakses 12 Agustus 2010

kewajiban untuk memperbaiki kerusakan, terutama dengan tidak adanya kerangka yang mengikat secara hukum, akan benar-benar tidak dapat diterima. Tanpa skema kompensasi tambahan instrumen akan sia-sia. Skema kompensasi tambahan adalah inti.

Pendekatan administrasi (domestik) untuk merespon dan pemulihan adalah elemen penting dari sebuah rezim kewajiban, tetapi itu sendiri bukan elemen internasional. Pendekatan seperti itu hanya menempatkan beban pada negara-negara pengimpor untuk mengambil tindakan. Dengan demikian hanya beban negatif pada negara-negara pengimpor, tanpa melibatkan beban pada negara-negara pengeksport. Pemerintah Australia bisa mengambil semua langkah ini pada mereka sendiri. Selain itu, pendekatan ini tidak ada kaitannya dengan pemulihan, yaitu tidak ada kewajiban untuk mengembalikan uang negara-negara pengimpor atas kerusakan yang ada.

Sebuah rezim yang mengikat secara hukum pada pendekatan administratif tidak boleh diterima kecuali jika disertai dengan skema kompensasi tambahan yang efektif. Jika diterima, ada beberapa unsur utama yang harus ditangani seperti perpindahan yang tidak disengaja, kerusakan di luar wilayah yurisdiksi nasional, non-Pihak serta dampak kesehatan manusia dan sosial-ekonomi. Sebagai contoh, skema yang diusulkan tidak akan mencakup kerusakan pada lautan, seperti yang dapat disebabkan oleh rekayasa genetik ikan

yang melarikan diri atau dilepas ke lautan dan menyebabkan kerusakan pada stok ikan di sana.

3) *Civil liability*

Aturan liabilitas untuk kegiatan-kegiatan berbahaya di tempat dengan rezim lain sering memerlukan liabilitas yang ketat dan pergeseran beban pembuktian. Pertemuan Cartagena harus memberikan tanggung jawab yang ketat sebagai standar kewajiban, yang berarti tidak perlu membuktikan kesalahan. Ini benar-benar penting. Banyak unsur mengikuti dari liabilitas yang ketat, termasuk penyaluran kewajiban kepada importir atau operator. Liabilitas yang ketat adalah standar kewajiban di banyak negara, dan setiap teks dinegosiasikan seharusnya tidak berpengaruh terhadap standar liabilitas yang ketat.

Setiap rezim harus menjamin akses yang memadai terhadap keadilan bagi korban kerusakan yang disebabkan oleh organisme rekayasa genetik. Bukti kerusakan dari organisme rekayasa genetik dan isu sebab-akibat dapat menempatkan ketidakadilan atau tidak dapat mengatasi beban korban. Di samping itu, lambatnya pergerakan dampak negatif, mungkin sulit untuk melacak dan melengkapi. Prinsip kehati-hatian juga relevan dan penting, dalam konteks pergeseran beban pembuktian kerusakan kepada mereka termasuk pengenalan organisme rekayasa genetik, dan dalam konteks membuktikan sebab-akibat. Beban pembuktian harus

bergeser ke eksportir, importir dan distributor dari gen, sekali setiap pelepasan ditemukan termasuk dimana gen atau terjadi kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh gen atau perkembangan atau pelepasannya. Biaya, pendirian dan aksesibilitas terhadap keadilan sangat penting. Suatu skema yang tidak menjamin akses terhadap keadilan, terutama di negara-negara berkembang, akan mengabaikan keadilan.

Definisi kerusakan harus cukup luas untuk menutupi segala jenis kerusakan yang disebabkan oleh organisme rekayasa genetik. Konsisten dengan prinsip pencemar membayar, kerusakan harus menyertakan pemulihan, perbaikan, gangguan, dan tindakan pencegahan, seperti kerusakan pada milik pribadi, kerugian ekonomi dan cedera atau penyakit. Perlu jelas bahwa kerusakan sosial-ekonomi masyarakat adat lokal tercakup, mengikuti Pasal 24 dari Protokol.⁶¹

sejak Kevin Rudd diangkat menjadi perdana menteri pada Desember 2007, Australia mempunyai arah kebijakan yang berbeda di bidang lingkungan. Di masa pemerintahan PM John Howard, lingkungan bukan merupakan salah satu fokus kebijakan di negara tersebut.

Australia yang selalu berkiblat pada Amerika Serikat di masa itu, menolak menandatangani Protokol Kyoto. Namun kini,

⁶¹ <http://www.greenpeace.org/>

Australia malah tengah sibuk mempersiapkan suatu kebijakan dalam rangka memerangi pemanasan global, yang disebut Carbon Pollution Reduction Scheme.

Berbeda dengan energi terbarukan dipromosikan dengan pendekatan untuk menanggulangi krisis energi, Australia mempromosikan energi terbarukan dengan pendekatan lingkungan. Oleh karena itu, arah pengembangan energi terbarukan selalu terdapat di dalam kerangka program untuk memerangi pemanasan global.

Kondisi geografis Australia yang terletak di kawasan sub tropis bagian selatan menyebabkan negara tersebut mempunyai potensi yang sangat bagus untuk mengembangkan energi surya. Oleh karena itu, Pemerintah Australia secara serius mengembangkan energi surya baik untuk membangkitkan tenaga listrik maupun untuk keperluan lainnya, seperti memanaskan air. Berbagai program pengembangan energi surya dengan kucuran dana tinggi telah diluncurkan. Saat ini diperkirakan sekitar 2% dari kebutuhan energinya dipenuhi oleh energi surya.

Di tahun 2008, Pemerintah Federal Australia meluncurkan Program 'Australia's Solar City'. Program ini merupakan program terbaru yang melibatkan secara aktif masyarakat dan pemerintah lokal di tujuh kota. Pemerintah Federal Australia mengucurkan dana AUD\$ 94 juta. Kota-kota yang terpilih untuk mengikuti program

tersebut yaitu Alice Spring, Townsville, Perth, Blacktown, Coburg, Adelaide and Central Victoria. Dari ketujuh kota tersebut, diharapkan sebanyak 76.000 ton CO₂ per tahun dapat diturunkan melalui pemasangan 3.200 panel fotovoltaiik.

Pendekatan Pemerintah Federal Australia di dalam mengembangkan energi surya patut ditiru. Pemerintah Federal tidak segan untuk mengucurkan dana subsidi kepada kota-kota tersebut, asalkan masyarakat dan pemerintah setempat mampu menyediakan dana tambahan. Seperti Kota Townsville yang menerima kucuran dana sebesar AUD\$ 15 juta dari Pemerintah Federal. Konsorsium Townsville yang terdiri dari Pemerintah Queensland, Perusahaan Energi Ergon,

Dewan Kota Townsville, Perusahaan Delfin Lend Lease, Honeysombes Property Group serta Cafalo Pty Ltd, telah menyediakan dana tambahan sebesar AUD\$ 32 juta. Dengan label 'Smart Living Style' atau 'Green Living Style', pemerintah dan sektor industri mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi di dalam kegiatan audit energi secara gratis.

Masyarakat yang rumahnya telah diaudit dapat menerima peralatan hemat energi secara gratis pula. Bukan hanya itu, masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan peralatan energi surya dengan harga yang telah disubsidi.

Selanjutnya setiap kota yang termasuk ke dalam Program 'Solar City' tersebut dilengkapi dengan Smart Living Centre. Smart Living Centre merupakan one stop shop yang menyediakan berbagai peralatan dan suku cadang dari teknologi energi surya, seperti teknologi pemanas air, teknologi fotovoltaik, lampu hemat energi dan teknologi alat ukur yang canggih.

Melalui program ini, masyarakat yang berpartisipasi dijanjikan akan mampu menurunkan tagihan listriknya. Tentu saja hal tersebut dikarenakan masyarakat menggunakan teknologi fotovoltaik baik untuk penerangan maupun pemanas air.

Ditambah pula, masyarakat diharuskan menggunakan lampu hemat energi. Nah, jika masyarakat berhasil menurunkan pemakaian listriknya sebesar 10%-20%, maka Pemerintah akan memberikan diskon untuk tagihan listriknya sebesar 10%.

Jika pemakaian listrik dapat dirurunkan lebih dari 20%, maka Pemerintah akan memberikan diskon sebesar 20%. Program 'Solar City' ini juga merupakan sarana untuk mengumpulkan data carbon footprint. Data tersebut akan dikelola dan dikaji oleh perguruan tinggi yang telah ditunjuk. Data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai dasar kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, energi dan air.

Jika kita cermati, Program Australia's Solar City itu sungguh menggiurkan masyarakat. Masyarakat tidak hanya diuntungkan

secara finansial saja, namun juga dapat turut serta di dalam menanggulangi pemanasan global. Program ini juga mendorong penelitian dan industri teknologi energi bersih Australia berkembang.

4) Desakan *Greenpeace* Pada Pemerintah Terhadap Solusi Kopenhagen

Para pemerintah dunia memberikan insentif untuk perusahaan seperti APP dan APRIL untuk menghancurkan hutan tropis di Australia dan memicu perubahan iklim dengan memperkenankan impor produk kertas dan minyak mentah yang berasal dari penghancuran hutan. Dengan Konferensi Iklim (*Climate Conference*) di Kopenhagen yang pemimpin-pemimpin di seluruh dunia memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan menghasilkan rencana matang yang memasukkan mekanisme pendanaan dari negara-negara industri untuk berkontribusi setidaknya 30 milyar Euro per tahun bagi negara tempat beradanya hutan seperti Australia, Kongo dan Bazil untuk mengakhiri deforestasi tropis sebelum 2020. Kesepakatan tersebut akan menghasilkan reduksi emisi yang besar dari deforestasi serta menjaga kehidupan alam dan menghormati hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan. Harus dipastikan juga pendanaan tersebut tidak akan jatuh ke tangan yang justru bertanggung jawab akan deforestasi seperti industri kayu.

Greenpeace menyerukan kepada PM Kevin Rudd untuk memegang janjinya mengenai *zero deforestation* pada tahun 2015 di Australia dan mengimplementasi kan moratorium seketika atas deforestasi hutan dan lahan gambut untuk memberikan ruang bernafas untuk iklim sementara tindakan-perlindungan hutan dicanangkan agar menaati Protokol Cartagena. Sebuah protokol yang menyangkut keanekaragaman hayati.⁶²

Greenpeace meminta Group Friends of the Co-Chairs tentang kewajiban dan ganti rugi (Liability Redress) yang berlangsung di Kualalumpur, Malaysia, 8-12 Februari 2010 untuk menyelesaikan kesepakatan rejim kewajiban mengikat seperti yang telah disepakati di Bonn pada tahun 2008, sehingga memastikan bahwa kompensasi dan ganti rugi untuk kerusakan akan ada. Cakupan yang luas, tanggung jawab yang ketat, keamanan finansial dan pengecualian terbatas diperlukan untuk memastikan bahwa pembayaran ganti rugi benar-benar ada dan dilakukan.⁶³

Selain itu juga meminta Friends agar menetapkan dana cadangan untuk memastikan bahwa dimana semuanya gagal, lingkungan hidup dapat dilindungi dan korban mendapat kompensasi. Tanpa dana ini, dokumen yang disetujui cenderung hanya kata-kata. *Greenpeace* menyerukan kepada industri untuk mendukung klaim

⁶² Ani Purwati dalam <http://www.beritabumi.or.id/beritadtl&newsID=B0243&ikey=Greenpeace>: Selesaikan Kesepakatan Rejim Kewajiban Mengikat Protokol Cartagena, diakses 12 Agustus 2010

⁶³ Berita Bumi, Jakarta- *Greenpeace* mendesak negara maju yang tergabung dalam Group Friends of The Co-Chairs

keselamatan mereka dengan dana, jika klaim mereka hanya suara, maka tidak akan membutuhkan kelengkapan lagi. Negara pengimpor agar menetapkan rezim kewajiban dan ganti rugi mereka jika negara tidak menyiapkan dengan niat baik untuk menyetujui persyaratan fundamental ini.

Ini adalah pertemuan penting di tahun penting. Ini adalah Tahun Internasional Keanekaragaman Hayati dan tahun COP / MOP 5 di Nagoya ketika instrumen ini akan selesai. Di Bonn pada Mei 2008, dalam perjanjian penting yang dimasukkan dalam pertemuan Friends ini, tidak ada perbedaan pendapat baik dalam (a) pekerjaan tentang instrumen yang mengikat secara hukum untuk pendekatan administratif dan (b) pekerjaan tentang suatu instrumen yang mengikat secara hukum perdata . Ini adalah kesepakatan penting yang membentuk dasar dari pertemuan.

Peraturan dan prosedur tentang kewajiban dan ganti rugi merupakan komponen penting rezim keamanan hayati (*biosafety*) global. Pertemuan Friends of the Chair di Kuala Lumpur berunding atas dasar keputusan BS-IV/12 dan lampirannya serta atas dasar kesepakatan untuk mencapai rezim yang mengikat di Bonn. Kami mengingatkan para delegasi bahwa 82 Like-Minded Friends

memprakarsai upaya ini untuk mendukung rezim yang mengikat tanggung jawab perdata (*civil liability*).⁶⁴

Greenpeace Australia menyerukan kepada semua negara untuk memastikan bahwa industri akan membayar 100% dari kerusakan. *greenpeace* terus mengingatkan para delegasi bahwa kita perlu dana cadangan untuk memastikan bahwa uang yang digunakan untuk menjamin lingkungan hidup jelas, serta para korban dan negara-negara berkembang diberikan kompensasi dan tidak keluar dari ketentuan. Kami percaya bahwa hukum yang mengikat dana cadangan secara hukum adalah satu-satunya cara yang sederhana dan praktis untuk memastikannya.

B. Tekanan *Greenpeace* Melalui Saluran Tidak Langsung

Sejak Kevin Rudd diangkat menjadi perdana menteri pada Agustus 2007, Australia mempunyai arah kebijakan yang berbeda di bidang lingkungan. Di masa pemerintahan PM Kevin Rudd, lingkungan bukan merupakan salah satu fokus kebijakan di negara tersebut. Australia yang selalu berkiblat pada Amerika Serikat di masa itu, menolak menandatangani Protokol Kyoto. Namun kini, Australia malah tengah sibuk mempersiapkan suatu kebijakan dalam rangka memerangi pemanasan global, yang disebut *Carbon Pollution Reduction Scheme*.

Australia memosisikan diri sebagai pemimpin global dalam kebijakan perubahan iklim. Bahkan jika negara-negara berkembang seperti Australia dan India untuk terus melawan upaya pengendalian emisi, Australia akan meneruskan

⁶⁴ Dian Kusri dalam http://www.waspada.co.id/Seruan_Greenpeace_terhadap_pemerintah.htm, diakses 12 Agustus 2010

peduli. Itu semua akan ditahan hari ini dengan Perdana Menteri pengumuman bahwa pengenalan dari skema perdagangan emisi akan ditunda dari rencana semula mulai tanggal pada bulan Juli 2010-2011 di awal. Legislasi untuk skema belum melewati Parlemen dan pemerintah masih berniat untuk memiliki diselesaikan tahun ini.

Kelompok usaha, kelompok hijau dan Oposisi tidak pernah akan memastikan transisi yang mudah untuk skema dan yang sedang berlangsung krisis keuangan global bahkan lebih jelas menempatkan rasa takut ke dalam komunitas bisnis untuk menekan depan. Kelompok hijau di sisi lain, jangan percaya skema berjalan cukup jauh untuk pengendalian polusi.

1. Tekanan Greenpeace Melalui Aksi-aksi

Pertemuan para menteri Energi APEC yang digelar di Australia mendapatkan kecaman dari para aktivis lingkungan. Aktivis Greenpeace Australia menggelar demonstrasi anti nuklir merupakan pesan yang jelas kepada para menteri energi dari 21 anggota ekonomi APEC untuk menghentikan pemakaian dan pengembangan sumber energi yang merusak lingkungan hidup.

Hal tersebut merupakan sebuah pesan yang jelas bagi para menteri energi APEC yang bertemu. Aksi yang digelar selama tiga hari ini bukan semata-mata ditujukan untuk Pemerintah Australia, namun juga kepada anggota APEC. Aksi demonstrasi damai sejumlah aktivis "Greenpeace" dan Northern Territory Environment Center" di taman kota samping gedung Parlemen. Meskipun tidak ada petisi khusus yang disampaikan kepada para

menteri energi APEC, namun pada demonstrasi hari kedua yang bertepatan dengan pertemuan puncak para menteri itu, Greenpeace berencana menyerahkan buku laporan Greenpeace berjudul "Energy (R)Evolution: A Sustainable OECD Pacific Energy Outlook".⁶⁵

Buku laporan itu secara gamblang memberikan berbagai alternatif energi yang ramah lingkungan dan harganya terjangkau masyarakat dan secara perhitungan ekonomi pun menguntungkan.

a. Aksi Demonstrasi Greenpeace

Aksi demonstrasi anti nuklir yang digelar sejumlah aktivis *Greenpeace* dan "Northern Territory Environment Center" (Pusat Lingkungan Hidup Northern Territory) itu menarik perhatian beberapa warga setempat, aparat kepolisian dan anggota delegasi pertemuan tingkat menteri energi APEC. Para aktivis itu menggelar berbagai spanduk dan poster berisi penolakan terhadap nuklir dan sumber energi lain, termasuk batubara, yang mereka yakini tidak ramah lingkungan.

Aksi itu menarik perhatian sejumlah anggota delegasi anggota ekonomi APEC yang hendak menghadiri acara resepsi dari pejabat negara bagian Northern Territory (NT). Para petugas kepolisian NT tampak santai mengamati aksi demonstrasi yang meriahkan dengan pemasangan cerobong asap nuklir berbahan kain parasut, deretan

⁶⁵ Linda Austin dalam <http://www.w3.org/TR> Nasionalisasi Perusahaan Minyak Raksasa, Musuh Rakyat dan Planet Ini. htm diakses 10 Mei 2011

bendera kecil anggota-anggota ekonomi APEC, spanduk dan poster di rumput hijau taman kota Darwin itu.

“Don’t Waste the Territory” (Jangan Kotori Territori), *“Save Uranium in the Ground”* (Selamatkan Uranium di Bumi), *“No More Uranium”* (Jangan Ada Lagi Uranium), dan *“I Love Clean Energy and I Vote”* (Saya Cinta Energi Bersih dan Saya Pilih) adalah isi dari beberapa spanduk dan poster yang digelar para aktivis tersebut.

Penolakan terhadap energi nuklir di Australia sebelumnya sempat disinggung pakar nuklir terkemuka negara itu, Prof. George Dracoulis, saat berbicara di depan Forum Bisnis Energi APEC. Ia mengatakan, walaupun Australia berkemampuan besar dalam sumberdaya dan teknologi pembangkit energi nuklir, namun negara itu tidak dapat segera memiliki reaktor nuklir dalam waktu dekat karena masih kuatnya penentangan dari masyarakat, katanya.⁶⁶

Prof. George Dracoulis, mengatakan, Australia setidaknya membutuhkan waktu 15 tahun lagi untuk dapat memasuki era nuklir untuk tujuan damai guna memenuhi keamanan energinya. Merujuk pada pengalaman negara-negara yang telah memiliki reaktor nuklir untuk listrik, seperti Jepang, setidaknya diperlukan waktu lima tahun untuk membangun reaktor, katanya dalam forum yang dihadiri puluhan pengusaha, pejabat pemerintah, dan pemerhati energi anggota ekonomi APEC lainnya.

⁶⁶

<http://www.minihub.org/siarlist/msg00144.html> diakss 6 Agustus 2010

Nuklir merupakan sumber energi yang secara ekonomis kompetitif di Australia, namun penentangan dari masyarakat dan beragamnya kebijakan di tingkat pemerintah negara bagian dan federal masih menjadi kendala. Terkait dengan ambisi Australia untuk masuk ke era energi nuklir guna mengamankan kebutuhan negara itu akan energi, Perdana Menteri Kevin Rudd dalam berbagai kesempatan telah mengingatkan pentingnya energi nuklir bagi masa depan Australia dan respons negara itu pada fenomena pemanasan global.

PM Rudd mengatakan, setiap orang yang sangat serius dalam menanggulangi berbagai tantangan pemanasan global wajib mempertimbangkan energi nuklir. Itulah sebabnya, di bentuk tim ahli yang bertugas melihat seluruh aspek energi nuklir sebagai opsi (pilihan) bagi Australia. Sejauh ini, sudah 442 reaktor nuklir berdiri di 31 negara dan memproduksi sekitar 16 persen listrik dunia. Negara-negara yang pernah mempertimbangkan pelarangan energi nuklir telah berubah pikiran.

Finlandia misalnya pada 2002 memutuskan pembangunan reaktor kelimanya dan direncanakan selesai pada 2009. Referendum di Swiss pada 2003 berakhir dengan penolakan terhadap mosi penghilangan energi nuklir dan menyepakati energi nuklir sebagai bagian dari keragaman sumber energi negara itu di masa depan, katanya.

APEC beranggotakan Australia, Amerika Serikat, Brunei, Kanada, Chile, RRC, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Philipina, Rusia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Ke-21 anggota ekonomi APEC itu diperkirakan membutuhkan 60 persen dari total kebutuhan energi dunia dan merupakan pemakai terbesar keempat energi dunia. Pada 2030, kebutuhan energi mereka diperkirakan meningkat dua kali lipat.⁶⁷

Global Initiative on Forest Climate (GIFC) yang merupakan kebijakan Pemerintah Australia dalam membantu pengurangan gas emisi CO₂. Australia terpilih dengan pertimbangan merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Untuk program tersebut, Perdana Menteri Australia telah mengumumkan alokasi dana sebesar A\$ 200 juta dalam bentuk global fund yang akan dipergunakan untuk kegiatan di berbagai negara dalam rangka penurunan greenhouse gas emissions, dengan kegiatan antara lain berupa : mencegah perusakan hutan, meningkatkan rehabilitasi hutan dan penanaman kembali kawasan hutan serta penerapan *sustainable forest management*.

Untuk merealisasikan program GIFC, Menteri Luar Negeri RI dan Australia telah mengeluarkan *Joint Announcement " Forest and Climate Partnership "*. Dalam *Announcement* tersebut, Pemerintah

⁶⁷ Antara, Senin, 26 April 2010

Australia akan menyediakan anggaran sebesar A\$ 30 juta, diantaranya untuk kegiatan rehabilitasi lahan di Australia Utara.

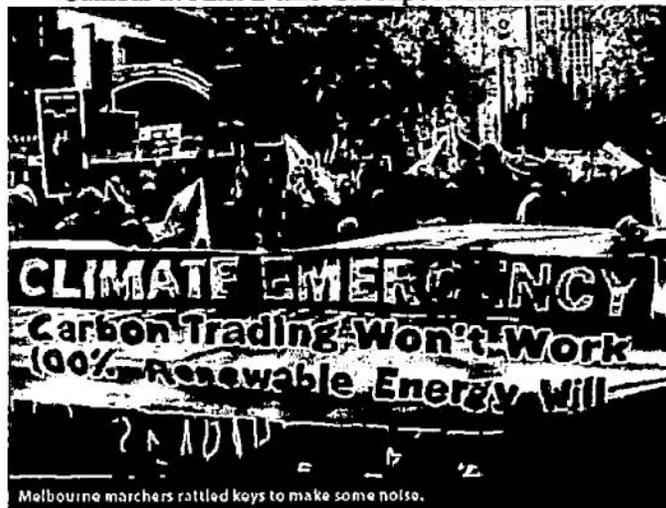
Salah satu tindak lanjut Joint Announcement Pemerintah Australia telah menandatangani dokumen kerjasama berupa *Subsidiary Arrangement between Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia Relating to a Program of Bilateral Cooperation to Reduce Greenhouse Gas Emissions Associated with Deforestation in Indonesia under the Global Initiative on Forest and Climate* pada tanggal 3 Oktober 2007.

Dalam *Working Group Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD); Capacity Building* dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut; penelitian dan rehabilitasi lahan gambut. Pemerintah Australia mulai mempersiapkan rencana implementasi dari *Subsidiary Arrangement* tersebut dan pada awal Nopember 2007 akan dilaksanakan pertemuan pejabat senior Pemerintah Australia.

Gambar 4. Aksi Demo Greenpeace



Gambar 2. Aksi Demo Greenpeace di Melbourne



b. Aksi Menggalang Dukungan dengan NGO Lain

Greenpeace berhasil mengubah kebijakan pemerintahan dunia dari yang tidak berpihak pada pelestarian lingkungan dan perdamaian menjadi kebijakan yang pro-lingkungan dan perdamaian. Tonggak keberhasilan *Greenpeace* pertama adalah menghentikan percobaan nuklir Amerika Serikat di Amchitka Island, Alaska. Aksi *Greenpeace* mampu mengubah kebijakan Australia. Pemerintah Amerika Serikat sendiri menghentikan percobaan senjata nuklir dikawasan itu dan

memetakan kawasan itu sebagai kawasan lindung untuk burung-burung.

Forest Peoples Programme yang berkedudukan di Australia telah mempublikasikan sebuah survei mengenai pandangan masyarakat terhadap FCPF dan sebuah dokumen tentang FCPF, yang menyoroti kelemahan utama FCPF sekaligus menguraikan pengembangan serta strukturnya. Kedua dokumen tersebut menunjukkan kegagalan memalukan Bank Dunia untuk berkonsultasi sebelumnya dengan masyarakat adat mengenai FCPF – sebaliknya, Bank Dunia malah memilih melakukan konsultasi retroaktif (setelah obyek konsultasi terbentuk) tahun ini, dikarenakan oleh banyaknya kritik.⁶⁸

Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) Ornop-ornop yang menghadiri konferensi Bali mendesak agar FCPF tidak diluncurkan sehubungan dengan kekurangan FCPF yang serius, termasuk struktur pemerintahan yang timpang, kurangnya transparansi, kurangnya perhatian terhadap mandat Bank Dunia untuk pengurangan kemiskinan dan terlalu bergantung kepada mekanisme berbasis pasar untuk membayar REDD.

Pengkampanye perubahan iklim untuk Masyarakat Lingkungan Hidup Australia menyebut peluncuran FCPF sebagai kekonyolan. Orang akan mengira bahwa Bank Dunia mempunyai usulan yang sangat bagus, baik untuk penduduk dan, tentu saja, bagi kalangan

⁶⁸ www.forestpeoples.org/documents/forest_issues/bases/forest_issues.shtml

bisnis. Namun kenyataannya, tidak ada yang melihat bahwa Bank, melalui pinjaman dan kebijakan pembangunannya, tengah mempromosikan deforestasi di negara seperti Australia.⁶⁹

Laporan terkini dari Rainforest Foundation Inggris menyimpulkan bahwa “FCPF bisa menjadi bukti pengalihan yang sangat mahal dan tidak efektif dari tugas penting menghentikan deforestasi hutan tropis dalam jangka pendek melalui mekanisme yang sudah ada”. Lebih lagi, penelaahan terhadap FCPF telah mengungkap bahwa Bank Dunia tidak melakukan analisis apapun atas dampak yang mungkin timbul dari kredit ‘pencegahan deforestasi’ di pasar karbon yang ada⁷⁰.

Dengan semakin dekatnya tenggat waktu bagi proses antar pemerintah untuk menyetujui kesepakatan iklim pasca protokol Kyoto tahun 2009, pertemuan kelompok masyarakat sipil Asia Pacific di Bangkok bulan Juli 2009, kembali menyerukan keadilan iklim.

Aktivis anti-kemiskinan global juga mengecam negara-negara terkaya atas kegagalan mereka menepati janji untuk memberikan komitmen penuh terhadap perubahan iklim pada pertemuan G8 bulan Juni di Hokkaido. Para aktivis menyerukan untuk keluar sama sekali dari tatanan global saat ini untuk menghadapi krisis iklim. Lebih dari 170 peserta, termasuk nelayan, petani, masyarakat adat, perempuan,

⁶⁹ Torry Kuswardono, dalam artikel untuk Bretton Woods Project, yang berjudul ‘Whoever loses, the Bank always wins’ (Siapapun yang rugi, Bank selalu menang).

⁷⁰ Carbon Sunk tersedia di www.rainforestfoundationuk.org/. Lihat pula update dari Bretton Woods Project, eg www.brettonwoodsproject.org/art-561066

pemuda dan aktivis dari 31 negara menghadiri konferensi di Bangkok yang berlangsung selama 3 hari pada bulan Juli dan diselenggarakan oleh Focus on the Global South.

Disebutkan dalam konferensi itu bahwa negara-negara industri bertanggungjawab terhadap sekitar 90% emisi gas rumah kaca, tetapi 99% dari resiko akibat perubahan iklim ditanggung oleh masyarakat di negara-negara berkembang. Para peserta mengutarakan kekecewaannya atas kegagalan mereka yang selama ini mendominasi pembahasan mengenai iklim – pemerintah DTE dan perusahaan-dalam usaha mengatasi penyebab perubahan iklim.

Kelompok-kelompok itu menghimbau pemerintah untuk memberikan perhatian serius atas masalah konsumsi yang berlebihan di negara-negara maju dan di antara elit-elit negara berkembang. Kelompok-kelompok itu mencapai konsensus dalam perlawanan mereka terhadap skema penjualan karbon dan carbon offset, seperti prakarsa Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM)² dan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), yang memberikan kesempatan bagi para pencemar untuk membeli jalan keluar dalam upaya mengurangi emisi.

Aktivis LSM Australia juga mengatakan bahwa industrialisasi bahan bakar nabati, mega proyek bendungan dan tenaga nuklir adalah solusi palsu yang akan memperburuk krisis iklim dan memperdalam jurang ketimpangan global

Direct action adalah aksi protes di mana aktivis atau pemrotes melawan melalui aksi yang dirancang bukan hanya untuk mengubah kebijakan pemerintah atau mengubah opini publik melalui media, tetapi juga mengubah kondisi lingkungan di sekeliling mereka secara langsung. *Direct action* menarik kekuatan (*power*) melalui dua pemikiran logis.

Pertama, (mengikuti *satyagraha* atau *truth-force*-nya Mahatma Gandhi), aktivis mencoba mempengaruhi lawan agar mengubah rencananya dengan menunjukkan perspektif mereka memiliki moral yang lebih tinggi (*moral superiority*) melalui kepasrahannya menjalani pengorbanan diri atau keadaan tidak menyenangkan, seperti mengikat diri pada rel kereta.

Pemikiran logis kedua adalah menjadi saksi (*bearing witness*). Logika *bearing witness* ini membawa pesan yang jernih pada lawan bahwa para aktivis yakin apa yang dilakukan pemerintah atau perusahaan salah. Kedua pemikiran logis ini memberikan tekanan moral pada lawan yaitu pemerintah.⁷¹

Greenpeace sudah memulai *bearing witness* dan *direct action* sejak awal, ketika tahun 1971 para pendiri Greenpeace menggunakan kapal ikan tua belayar "Phyllis Cormack" dari Vancouver, Kanada, menuju Pulau Amchitka, pulau kecil di Tepi Barat Alaska. Meskipun

⁷¹ Seel, Benjamin, Mathew Paterson, dan Brian Doherty (Eds). 2000. *Direct Action in British Environmentalism*. London dan New York: Routledge

hanya kapal kecil tua, Phyllis Cormack dicegah oleh tentara Amerika Serikat sebelum tiba di Pulau itu.

Persekutuan ini tidak permanen. Untuk satu isu lingkungan tertentu mungkin saja Greenpeace bersekutu dengan pemerintah, tetapi untuk isu yang berbeda Greenpeace memposisikan pemerintah sebagai musuh. Misalnya untuk isu perdagangan limbah B3, Greenpeace memposisikan negara berkembang (termasuk Australia) sebagai sekutu dan pemerintah negara maju sebagai “musuh.” Tetapi untuk isu kehutanan, Greenpeace memposisikan Pemerintah Australia sebagai “musuh.

Beberapa LSM/NGO yang mendukung upaya Greenpeace menyangkut masalah penyelamatan lingkungan diantaranya :

- 1) Environmental Defenders Office (EDO) (Kantor Pembelaan Lingkungan Hidup, Australia). <http://www.edo.org.au/> Email: edonsw@edo.org.au

Jaringan Nasional EDO terdiri dari sembilan kantor hukum lingkungan hidup masyarakat yang dikelola secara independen, tersebar di Australia. Setiap kantor EDO bertujuan melindungi lingkungan hidup untuk kepentingan umum.

- 2) Pusat Teknologi Lingkungan Hidup, Universitas Murdoch (Australia Barat) <http://www.wies.murdoch.edu.au/etc/> Email: anda@essun1.murdoch.edu.au

Tujuan daripada ETC adalah untuk meneliti, membangun dan menunjukkan teknologi-teknologi lingkungan hidup, melakukan pendidikan dan pelatihan, memberikan pelayanan nasihat pada industri, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai teknologi-teknologi lingkungan hidup. Di kantor ini juga ada pameran teknologi pembangunan berkelanjutan yang terpadu dan dapat dioperasikan.

- 3) Mineral Policy Institute (MPI) (Institut Kebijakan Mineral, Australia) <http://www.mpi.org.au/> Email: mpi@mpi.org.au
MPI memantau dan berkampanye mengenai dampak luas lingkungan hidup dan sosial dari industri mineral di kawasan Asia Pasifik.⁷²

Gambar 5. Aksi Greenpeace menghalangi Perburuan Ikan Paus



⁷²

⁷² <http://www.geocities.com/etngoforum/nngo.html>, di akses 4 Mei 2011

2. Tekanan *Greenpeace* Melalui Media Massa

Greenpeace melalui opini di berbagai media Australia seperti di tulis dalam Harian *The Sunday Telegraph* dalam laporannya 19 Agustus 2007, menyebutkan draf deklarasi tentang perubahan iklim, keamanan energi dan pembangunan yang bersih yang dibocorkan ke Partai Hijau Australia itu telah disiapkan Pemerintah Federal Australia untuk KTT APEC Sydney.

Draf deklarasi yang disusun pemerintahan PM Kevin Rudd itu dituding *Greenpeace* hanya mengimbau para pemimpin APEC untuk menentukan tujuan-tujuan mengurangi emisi rumah kaca namun tidak menetapkan target-target polusi yang bersifat wajib. Juru bicara ALP untuk urusan lingkungan, Peter Garrett, mengatakan, konsep deklarasi APEC tentang perubahan iklim itu menciptakan keabsurdan terhadap klaim PM Kevin Rudd selama ini bahwa KTT APEC Sydney akan menjadi KTT perubahan iklim terpenting dalam 15 tahun.

Kalau benar draf dokumen APEC itu tidak memasukkan komitmen terhadap target yang mengikat bersamaan dengan pengakuan terhadap proses-proses PBB, maka hal itu menunjukkan posisi pemerintah (Australia) yang lemah dan tidak konsisten terhadap (isu) perubahan iklim.

a. Tekanan Melalui Media Cetak

Surat kabar "The Sunday Telegraph" menyebut dokumen mengenai perubahan iklim yang disampaikan Pemerintah Australia dalam KTT APEC di Sydney September 2007 itu kemungkinan

menjadi “satu komponen utama kesepakatan internasional baru menggantikan Protokol Kyoto setelah 2012.

Aktivis *Greenpeace* melalui surat kabar “The Sunday Telegraph”, Ben Pearson mengatakan, dokumen itu menunjukkan PM Kevin Rudd mencoba menggunakan APEC untuk mengecilkan arti Protokol Kyoto. “Ini deklarasi buatan Amerika Serikat yang dibungkus dengan abu batubara Australia. Jika Jepang, Kanada, dan Selandia Baru mau menandatangani (draft) deklarasi Sydney tentang perubahan iklim itu, berarti ketiga negara ini justru melemahkan komitmen mereka sendiri terhadap target pengurangan emisi sesuai dengan apa yang digariskan dalam Protokol Kyoto.”⁷³

Anehnya selama, hal-hal yang benar-benar akan ke arah yang berbeda. Belum lama ini dianggap sebagai salah satu duri di sisi upaya pengendalian polusi global, Australia adalah memiliki sesuatu dari revolusi hijau. Sementara itu, tekanan dari media dan pakar lingkungan terhadap negara pemerintah Australia, untuk mencapai target pengurangan emisi pada 2012 semakin kuat. Tekanan itu memuncak seiring digelarnya pertemuan puncak tingkat tinggi. Selama ini Australia berupaya mengganjal proses negosiasi dalam UNFCCC di Nusa Dua, Bali. Dalam draft

⁷³ <http://www.antara.co.id/en/arc/2010/11/11/greenpeace-stops-palm-oil-shipments-from-leaving-Australia/> Diakses tanggal 4 Mei 2011

Bali Roadmap yang tidak mengikat, negara-negara industri didesak untuk mengurangi emisi 25–40% pada 2020.⁷⁴

Namun draf tersebut tidak memiliki kekuatan untuk memaksa negara-negara industri benar-benar mencapai target tersebut. Media Australia bersama *greenpeace* menilai, Australia harus mengikuti jejak EU (Uni Eropa) dalam pengurangan emisi. Uni Eropa sendiri telah berkomitmen untuk mengurangi emisi. Kami harap negara maju juga mencapai target tersebut pada 2020,” kata Stavros Dimas dari Komisi Eropa di Bali International Convention Centre (BICC). Dimas menjelaskan, Uni Eropa memiliki kebijakan tentang penggunaan bahan bakar fosil yang sangat ketat.

Pendapat senada diutarakan Marcelo Furtado dari Greenpeace Australia yang dilansir surat kabar Sydney Gazette. Negosiasi yang ada di sini berangkat dari pendanaan, bukan beranjak dari isu lingkungan itu sendiri. Seharusnya mereka serius tentang bagaimana masalah perubahan iklim dapat ditangani. Mereka (negara maju) tidak peduli pada apa yang terjadi dengan lingkungan,” katanya. Posisi Jepang dalam UNFCCC juga dikritik keras Meyer.”Jepang bergabung dengan Amerika Serikat (AS) untuk memblokir proses negosiasi.⁷⁵

⁷⁴ www.cifor.cgiar.org/NR/rdonlyres/4E81DB28-410F-4885-ACB6-6CA802603A32/0/Australia.pdf

⁷⁵ <http://mukhyi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9123/Trans-v1-n2-artikel6-agust2006.pdf>

Greenpeace untuk program tiga tahun ke depan memfokuskan penguatan organisasi *Greenpeace* Australia. Kampanye akan fokus pada persoalan kehutanan terutama hutan gambut terkait dengan pemanasan global/perubahan iklim. *Greenpeace* Australia menargetkan nol deforestasi (*zero deforestation*) terutama hutan yang kritis tahun 2011. *Greenpeace* menargetkan 2009 pemerintah Australia mengumumkan moratorium perusakan hutan gambut. Tahun 2010, pemerintah Australia menetapkan moratorium penebangan untuk semua jenis hutan.

Selain media, aktor sosial dalam jaringan modal sosial *Greenpeace* Australia adalah organisasi yang ingin dipengaruhi opini, perilaku, dan kebijakannya. Menurut Nan Lin mengapa sumber daya dalam jaringan sosial menguatkan hasil dari aksi antara lain bisa dijelaskan bahwa hubungan sosial itu memberikan pengaruh pada aktor sosial yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Nan Lin juga menjelaskan individu atau organisasi bisa mengakses sumber daya sosial dalam hubungan sosial dengan individu atau organisasi lainnya.⁷⁶

Hubungan sosial antara *Greenpeace* dengan media internasional, media Australia, volunteers, cyber activists, dan Jikalauhari (sebagai sumber daya dari modal sosial), menguatkan

⁷⁶ Lin, Nan. 2006. *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge: Cambridge University Press

kampanye (aksi) Greenpeace Australia memberikan power lebih untuk mendesak perubahan kebijakan kehutanan pada aktor Menteri Kehutanan. Modal sosial *Greenpeace* mendesak Menteri Pertanian Australia, Menteri Perdagangan Perdagangan dan RSPO, mengubah kebijakan terkait dengan minyak mentah.

Gambar 6. Aksi *Greenpeace* melalui Media Luar Ruang



Greenpeace, sebagai organisasi non-pemerintah, memegang teguh prinsip transparan dan akuntabilitas. Dua prinsip ini menjadi penting karena *Greenpeace* harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada para *supporter* individu dan *foundation* yang memberikan dana. Setiap tahun keuangan *Greenpeace* diaudit dan laporan audit terbuka untuk diperiksa oleh para *supporter*.

Greenpeace sebagai aktor sosial berhubungan dengan aktor-aktor lainnya. Hubungan dengan aktor lain itu terjadi karena *Greenpeace* dan aktor lain itu menganut dan percaya pada norma-

norma atau prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang pegang teguh Greenpeace. Nilai-nilai itu adalah: tanpa kekerasan (*non-violence*); independen dari politik (*political independence*); tidak memiliki sekutu atau musuh permanen (*no permanent allies or enemies*); transparan dan akuntabel; tidak menerima atau meminta dana dari pemerintah, perusahaan, atau partai, seperti diuraikan di atas. Hubungan itu memunculkan kepercayaan dan kepercayaan itu memberikan “keuntungan” bagi Greenpeace.

Jelas sekali modal sosial, seperti didefinisikan oleh Coleman, Putnam (Leonardi dan Nanetti), dan Fukuyama, melekat pada Greenpeace. Komponen utama modal sosial, seperti norma-norma, kepercayaan, dan jaringan sosial, bisa dengan jelas dilihat dalam setiap hubungan Greenpeace dengan aktor sosial lainnya. Greenpeace berinteraksi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan aktor sosial lainnya. Interaksi tidak akan terjadi jika tidak ada kepercayaan aktor sosial lainnya kepada Greenpeace.⁷⁷

b. Tekanan Greenpeace melalui Media Elektronik

Greenpeace Australia mengakses sumber daya sosial dari media internasional, media Australia, Jikalauhari, untuk

⁷⁷ Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: A Free Press Paperbacks Book.

mempengaruhi kebijakan aktor lainnya, misalnya, Unilever. Hasilnya, Australia memberikan komitmen hanya akan menggunakan minyak mentah dari pengelolaan yang berkelanjutan berdasarkan definisi *Greenpeace*. Semakin kuat hubungan *Greenpeace* dengan aktor media internasional dan media di Australia, semakin besar sumber daya sosial yang bisa dimanfaatkan *Greenpeace*.

Hubungan *Greenpeace* dengan media elektronik berjalan dengan baik. Dari sudut pandang *Greenpeace* Australia/GPAU yang diuntungkan dari hubungan sosial ini adalah *Greenpeace* Australia/ Dari sudut media, media internasional maupun media di Australia juga mendapatkan keuntungan karena ada aliran informasi dari *Greenpeace* sebagai sumber daya sosial yang dibutuhkan media. Hubungan sosial GP Australia/GPSEA dengan media meningkatkan hasil dari aksi karena hubungan itu memfasilitasi aliran informasi.

Posisi media dalam jaringan sosial *Greenpeace* Australia/ sangat strategis. *Greenpeace* Australia pada aktor lainnya. Sedangkan media selalu bersedia mengamplifikasi suara dan aksi *Greenpeace* Australia karena memberi mereka *social credential* dari *Greenpeace* Australia yang sudah memiliki reputasi internasional dan aksi-aksinya memiliki nilai berita yang tinggi. *Greenpeace* Australia dinilai sebagai organisasi yang memiliki

kredibilitas tinggi oleh media dan aksi-aksi Greenpeace Australia mendapatkan perhatian tinggi dari media. Dan berdasarkan survei GPAu tahun 2010, media adalah sumber informasi mengenai lingkungan paling diandalkan oleh masyarakat.

Mengapa sumber daya dalam jaringan sosial atau hubungan sosial meningkatkan hasil (*outcomes*) dari aksi atau tindakan (*actions*) dari aktor-aktor dalam jaringan sosial itu? ⁷⁸ada empat penjelasannya mengapa.pertama, terfasilitasi aliran informasi. Kedua, ikatan sosial ini membawa pengaruh pada agen (aktor-aktor) yang memegang posisi penting dalam pengambilan keputusan. Ketiga, hubungan sosial dan pengakuan hubungan pada individu, bisa dianggap oleh aktor-aktor sebagai *social credentials* (mandat sosial). Keempat, hubungan sosial ini diharapkan menguatkan identitas dan pengakuan.

Greenpeace Australia berhasil meyakinkan Unilever memberikan komitmennya hanya akan membeli minyak mentah dari industri minyak mentah yang berkelanjutan dan mendukung moratorium pembukaan hutan gambut untuk kehutanan, adalah hasil dari *Greenpeace* Australia mengaktifkan modal sosialnya, seperti dijelaskan Nan Lin *Greenpeace* Australia memanfaatkan media internasional maupun media di Australia mendorong Unilever bersedia mendengarkan argumen *Greenpeace* Australia.

⁷⁸ Lin, Nan. 2006. *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge: Cambridge University Press

Karena Greenpeace menganut prinsip “*no permanent allies or enemies*” maka tidak ada kerja sama yang formal antara *Greenpeace* Australia dengan aktor-aktor dalam jaringan sosialnya. Misalnya, *Greenpeace* Australia dengan media bentuk hubungan atau kerja sama sebatas *Greenpeace* Australia memberikan informasi yang menurut *Greenpeace* Australia akan bermanfaat bagi media (atau audience) itu. Aliran informasi inilah yang menjadi kunci menguatkan aksi-aksi GP Australia/GPAu di mata aktor lainnya. Publikasi media membuat GP Australia/GPAu mendapatkan *social credentials* sebagai pejuang lingkungan.

Hubungan *Greenpeace* Australia dengan *supporters*, *volunteers*, dan *cyber activists*, yang jumlahnya mencapai 500.000 individu, sangat khas. Pertama karena aktor-aktor ini adalah individual yang bisa dianggap organisasi karena memiliki kesamaan tujuan dan ciri-ciri. *Supporters* memberikan sumbangan uang kepada *Greenpeace* Australia karena mereka memiliki kepedulian dan tujuan yang sama dengan *Greenpeace* Australia atau dengan kata lain menganut norma-norma yang sama. Hubungan *Greenpeace* Australia dengan *supporters*-nya melibatkan aliran sumber daya informasi, dana (kapital), dan *social credentials*. Di Australia ada kurang lebih 10.000 *supporters*.

Demikian juga dengan *volunteers* dan *cyber activists* mereka memiliki kepedulian dan tujuan yang sama dengan *Greenpeace* Australia. Mereka merasa memiliki norma-norma yang sama. Hubungan *volunteers* dengan *Greenpeace* Australia lebih erat. *Volunteers* adalah bagian dari kegiatan,

Aksi-aksi yang dilakukan *Greenpeace* Australia sangat tergantung pada para *volunteer*-nya. Para *volunteers* harus melalui proses khusus sebelum mereka bisa terlibat dalam aktivitas *Greenpeace* Australia. *Volunteers* mengakses sumber daya pengetahuan dan keterampilan dari *Greenpeace* Australia. *Volunteers* juga akan mendapatkan *social credentials* karena posisi mereka sebagai bagian dari *Greenpeace* Australia.

Cyber activists adalah individu yang tersebar di seluruh dunia dan mereka berada di dunia maya Internet. Mereka menjadi penting bagi *Greenpeace* Australia karena mereka menjadi kelompok penekan model baru yang cukup efektif. Apa keuntungan para *cyber activists* ini, mereka tidak terlalu memperdulikan keuntungan karena motivasi mereka adalah adanya kesamaan kepedulian dan komitmen pada lingkungan dengan *Greenpeace* Australia.

Perbaikan atau manfaat langsung yang bisa dirasakan masyarakat tidak ada. Manfaat strategis *Greenpeace* Australia adalah mendorong munculnya kebijakan-kebijakan yang lebih

berpihak pada lingkungan dan sekaligus pada masyarakat. Dalam setiap kampanye *Greenpeace* Australia selalu mengajukan solusi bukan hanya menuntut. Misalnya, salah satu solusi yang ditawarkan oleh *Greenpeace* Australia adalah menerapkan model pengelolaan kehutanan berbasis masyarakat (*community-based forest management*). GP Australia/GPSEA juga mengajukan data yang menunjukkan masih banyak lahan non-gambut yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan.

Greenpeace Australia dibandingkan dengan organisasi non-pemerintah di bidang kepedulian lingkungan lainnya agak berbeda. *Greenpeace* Australia sangat menonjol kemandiriannya, salah satunya karena tidak tergantung pada dana pemerintah maupun perusahaan. Hasil survei pasar tahun 2010 yang *Greenpeace* di Australia menunjukkan keunikan posisi *Greenpeace* (sebagai satu entitas sebagai organisasi internasional). Orang Australia lebih bersedia menyumbangkan uangnya untuk yatim-piatu (97%) dan hanya 50% yang menjawab bersedia menyumbang untuk *Greenpeace*.⁷⁹

Dibandingkan organisasi non-pemerintah di bidang lingkungan lainnya, *Greenpeace* Australia adalah organisasi yang termasuk paling dipercaya untuk persoalan lingkungan. Masyarakat menempatkan *Greenpeace* sebagai organisasi yang

79

<http://www.planetark.com/>, di-akses 2/Jul/ september 2010

paling efektif (atau salah satu yang efektif) bekerja dalam bidang lingkungan. Australia masih terus bertumbuh meskipun laju pertumbuhan menurun akibat persoalan keuangan global. Dengan jumlah penduduk 237 juta jiwa (perkiraan sampai Juli 2010) akan mendukung pertumbuhan yang berlanjut. Turunnya laju pembangunan tidak berarti mengurangi atau menurunkan persoalan lingkungan yang dihadapi Australia.

Greenpeace Australia bisa memberikan sumbangan untuk perbaikan lingkungan di Australia melalui aktivitas independennya. Terbukti meskipun kurang dari tiga tahun beroperasi di Australia, *Greenpeace* Australia sudah memberikan sumbangan perubahan kebijakan yang lebih positif pada lingkungan. Antara lain, komitmen untuk tidak membuka lahan lagi untuk perkebunan. Dengan mengaktifkan modal sosialnya *Greenpeace* Australia bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik di Australia.

Greenpeace Australia juga melakukan aksi-aksinya dengan selalu mengkontak dan berhubungan dengan media massa. Beberapa langkah juga dilakukan melalui jejaring seperti :

Untuk menyebarkan gagasan hijau, *Greenpeace* Australia juga menggunakan media internet, termasuk Facebook dan Twitter. Dengan menggunakan nama akun The Climate Project Australia, para relawan ini menggalang dukungan untuk

acara-acara yang mereka buat semacam Green Festival, penanaman pohon bakau, dan semua kegiatan lain.

Greenpeace Australia sudah melakukan banyak sekali kampanye. Pada 23-24 Oktober 2009, para sukarelawan melakukan kampanye secara besar-besaran. Mereka menyebar ke 18 kota di Australia, di 40 lokasi, untuk bicara dengan 60.000 audiens. Sebagian lainnya memberikan presentasi di Cina, Sri Lanka, dan Taiwan. Semua dilakukan secara swadana, swadaya, swakelola, tanpa bayaran.

Lewat internet pula, mereka berbagi kiat-kiat hidup ramah lingkungan. Sejak awal pembentukannya, Australia memang lebih memfokuskan diri pada gerakan partisipasi masyarakat. “Kami fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan,” kata Amanda.Persis seperti prinsip yang dianut TCP Australia, “*Everyone can do something.*” Setiap orang bisa melakukan sesuatu.⁸⁰